

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	Suara Pembaruan	5	15-8-2002

RUU Ketenagalistrikan Rugikan Indonesia

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta merevisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan, sebelum meresmikannya. Jika tidak, pemerintah akan kesulitan membayar klaim kerugian miliaran dolar Amerika Serikat (AS) kepada perusahaan-perusahaan listrik swasta di Indonesia.

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN yang diwakili Ketua Departemen Advokasinya, M Yunan Lubis, di Jakarta, Rabu (14/8) mengatakan, hal yang membebankan pemerintah adalah RUU tersebut akan mengubah struktur PLN. Padahal, berdasarkan kontrak *Power Purchase Agreement* (PPA) dengan PLN, perubahan organisasi itu bisa membuka alasan bagi perusahaan listrik swasta untuk menyatakan *default*.

"Pada artikel 16.14 dalam kontrak PPA dan PLN dikatakan, BUMN Listrik itu bisa dianggap melanggar kontrak karena melakukan hal-hal yang tidak bisa diperbaiki (*non remediable events*). Hal-hal itu menyangkut perubahan struktur PLN, mulai dari pembubaran, merger, konsolidasi, penggabungan usaha, reorganisasi, rekonstruksi dan privatisasi," kata Yunan.

Jika kondisi itu terjadi,

PLN harus membayar kepada investor dengan harga yang telah ditentukan secara berlipat ganda. Ganti rugi itu meliputi investasi yang telah ditanam di listrik swasta bersangkutan, bunga pinjaman dari investor, penggantian kepada sponsor, dan bunga yang besarnya 22 persen setahun," katanya.

Sampai Juli 1998, investasi yang ditanamkan oleh perusahaan listrik swasta di Indonesia mencapai US\$ 15,874 juta. "Dengan investasi swasta sebesar itu, pemerintah melalui Pertamina berpotensi dikenai denda sampai miliaran dolar atau puluhan triliun rupiah," katanya.

Agar kekhawatiran SP PLN tidak terjadi, Yunan mengusulkan agar pemerintah, PLN, dan DPR, duduk bersama merevisi klausul itu. "Kajian mendetail harus dilakukan, supaya Indonesia terhindar dari kerugian-kerugian yang tidak perlu terjadi," tambahnya.

Yunan meminta agar pemerintah memahami mekanisme ini. Jangan sampai bantuan Asian Development Bank (ADB) sebesar US\$ 200 juta yang dijanjikan akan dikurangkan itu, menjadi "gula-gula" yang sebenarnya berpotensi merugikan Indonesia miliaran dolar. (K-10)